

**ANALISIS FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD
DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
(PERSEPSI PEGAWAI DINAS PEMERINTAH KOTA BOGOR)**

*ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING FRAUD PREVENTION IN THE PROCUREMENT
FRAUD OF GOOD/SERVICE
(PERCEPTION BOGOR CITY GOVERNMENT SERVICE EMPLOYEES)*

S.Hambani, Warizal, I.C.Kusuma, Ramadianti
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No.1, Kotak Pos 35, Kode Pos 16720, Telp/Fax : (0251) 8245155
susy.hambani@unida.ac.id, warizal@unida.ac.id, indra.cahaya.kusuma@unida.ac.id
Ramadianti08@gmail.com

ABSTRACT

Fraud prevention is an integrated effort, which is carried out by management to reduce the factors that cause fraud and needs to be carried out continuously without interruption. This research was conducted to find out empirical data on how much influence the role of organizational culture, e-procurement, whistleblowing system, and internal control either partially or collectively to prevent fraud in the goods/services procurement process. The population in this study were 19 Bogor City Government Offices. Sampling in this study using purposive sampling method, and the research sample is the procurement actors in each agency. Respondents in this study were 73 respondents from 19 Bogor City Government Offices. Tests and research instruments using SPSS 24 with multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that organizational culture, e-procurement, whistleblowing systems, and internal control have a positive and significant effect on fraud prevention in the goods/services procurement process either partially or simultaneously. Keyword: organizational culture, e-procurement, whistleblowing system, internal control, and fraud prevention.

ABSTRAK

Pencegahan kecurangan merupakan upaya yang terintegrasi, yang dilaksanakan manajemen untuk menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan serta perlu dilakukan secara terus menerus tanpa putus. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui data secara empiris mengenai seberapa besar pengaruh dari peran budaya organisasi, *e-procurement*, *whistleblowing system*, dan pengendalian internal baik secara parsial maupun secara bersama-sama untuk mencegah terjadinya *fraud* di dalam proses pengadaan barang/jasa. Populasi dalam penelitian ini merupakan 19 Dinas Pemerintah Kota Bogor. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dan sampel penelitiannya adalah pelaku pengadaan yang ada dalam setiap Dinas. Responden dalam penelitian ini sebanyak 73 responden dari 19 Dinas Pemerintah Kota Bogor. Pengujian dan instrumen penelitian menggunakan SPSS 24 dengan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi, *e-procurement*, *whistleblowing system*, dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa baik secara parsial maupun secara simultan.

Kata Kunci: budaya organisasi, *e-procurement*, *whistleblowing system*, pengendalian internal, dan pencegahan *fraud*.

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan perekonomian di Indonesia dan Dunia banyak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Akan tetapi pesatnya perkembangan perekonomian dunia juga diikuti dengan, semakin berkembangnya *fraud* atau biasa disebut dengan istilah kecurangan. *Fraud* menurut *fraud triangle theory* yang dikemukakan psikolog Donald Cressey (1953), mengatakan bahwa ada tiga dimensi yang menjelaskan mengapa seseorang melakukan *fraud*, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), pembenaran atau justifikasi (*rationalization*), tiga dimensi tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk konsep *aggregate* untuk menjelaskan beberapa faktor *fraud* secara komprehensif.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* kedalam tiga cabang besar, yaitu penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), asersi yang menipu (*fraudulent statement*), dan korupsi (*corruption*).

Menurut Pricewaterhouse Coopers dalam laporannya di *Global Crime Survey* pada tahun 2007 mencatat angka cukup fantastis untuk rata-rata total kerugian finansial suatu perusahaan karena *fraud* yaitu mencapai USD 3,2 juta. Sehingga dapat dikatakan bahwa *fraud* telah berkembang secara luas didunia, seperti halnya di Amerika Serikat. Kasus WorldCom, Global Crossing, Adelphia, Lucent Technologies, dan Enron, merupakan beberapa perusahaan di Amerika Serikat yang jatuh akibat *fraud* baik dengan pencurian aset, kejahatan komputer, korupsi ataupun manipulasi laporan keuangan.

Indonesia Procurement Watch (IPW) menyatakan bahwa 385 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 70 persennya merupakan kasus kecurangan dalam pengadaan barang/jasa.

Indonesian Corruption Watch (ICW) juga mengungkapkan bahwa kerugian negara mencapai 1,02 triliun rupiah sepanjang tahun 2017 yang disebabkan karena kecurangan pengadaan barang/jasa (*procurement fraud*).

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mengatakan bahwa kasus korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah menduduki peringkat kedua dari kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.

Menurut ranking indeks pengadaan barang/jasa di LPSE tahun 2018 yang dilakukan oleh KPK, provinsi Jawa Barat memiliki peringkat kedua terkecil dari kasus kecurangan pengadaan barang/jasa di Indonesia. Sedangkan menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* ada 5 provinsi yang rawan mengalami kasus kecurangan, terutama pada saat berlangsungnya Pilkada. Lima Provinsi tersebut diantaranya Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, dan Jawa Barat, hal tersebut dikarenakan banyak kasus kecurangan yang terulang di Provinsi tersebut. Dimana Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota berpotensi besar terjadinya kecurangan pengadaan barang/jasa. Salah satunya adalah Pemkab dan Pemkot Bogor (Didi & Indra, 2018). Diantaranya kasus dugaan dana fiktif pengadaan barang dan jasa pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bogor tahun 2018 senilai Rp 470 juta, yang melibatkan ASN (Aparatur Sipil Negara) dilingkup pemerintah kota Bogor dan kepala bendahara KPU yang juga menjabat sebagai kepala Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) KPU Kota Bogor (Bogor, Beritasatu.com). Kasus dugaan dalam pengaturan pemenang proyek tender pembangunan Stadion GOR Pakansari tahap tiga dengan menelan biaya lebih dari Rp 196 miliar, sehingga Unit III Kriminal Khusus (Krimsus) Kepolisian Resor Bogor mulai turun tangan untuk menyelidiki kasus yang sarat kegagalan dalam proses penentuan pemenang tender

proyek stadion bertaraf internasional tersebut. Teori atribusi yang dikembangkan oleh Kelley (1967), dan kemudian dikembangkan oleh Green serta Mitchell (1979). Dalam teori ini, mereka berpandangan bahwa perilaku kepemimpinan disebabkan oleh atribut penyebab. Jadi teori kepemimpinan atribut menjelaskan mengapa perilaku kepemimpinan terjadi. Teori ini juga tidak terlepas dari perilaku orang dalam organisasi, yaitu perilaku pimpinan dan perilaku bawahan. Sehingga, kepemimpinan tidak terlepas dari cara berpikir, berperasaan, bertindak, bersikap, serta berperilaku dalam pekerjaan di suatu organisasi dengan bawahannya atau orang lain (Waworuntu, 2003). Tindakan serta keputusan yang diambil oleh pemimpin ataupun orang yang diberikan wewenang, disebabkan oleh atribut penyebab. Termasuk perilaku tidak etis maupun kecurangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa. Faktor-faktor seperti pengendalian internal, budaya organisasi, *e-procurement*, dan *whistleblowing system* merupakan faktor yang digunakan pemerintah dalam mencegah terjadinya kecurangan didalam proses pengadaan barang/jasa.

Procurement fraud merupakan kecurangan yang terjadi saat proses pengadaan barang/jasa pemerintah atau perusahaan swasta berlangsung. Jenis kecurangan ini merupakan kecurangan yang sering terjadi dan tidak mudah dideteksi, dibuktikan dan dituntut karena banyak pihak yang terlibat, terutama pihak internal, dan dapat terjadi diberbagai siklus hidup pengadaan barang/jasa. Sehingga dibutuhkan beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Upaya pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang/jasa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya karena

adanya peran *e-procurement*, budaya organisasi, *whistleblowing system* dan pengendalian internal.

E-procurement secara umum dapat didefinisikan sebagai otomatisasi proses pengadaan organisasi dengan menggunakan aplikasi berbasis web (Nawidkk, 2016:329). *E-procurement* dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dibagi menjadi dua yaitu pelelangan elektronik (*e-tendering*) dan pembelian barang atau jasa secara elektronik (*e-purchasing*). Implementasi kebijakan *e-procurement* di Indonesia dimulai pada tahun 2006 dengan dibentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa (ULP), serta dikembangkan oleh pusat pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Nurlukman, 2017:82).

Kesadaran tentang adanya *fraud* dapat dimasukkan kedalam suatu budaya organisasi, dalam hal ini budaya organisasi berarti merupakan sistem yang dipercaya oleh para anggota suatu organisasi atau instansi yang menjadi suatu hal yang membedakan organisasi atau instansi dengan organisasi atau instansi lainnya. Tuanakota (2010), budaya organisasi atau perusahaan adalah nilai yang dirasakan bersama oleh para anggota organisasi yang diwujudkan dalam bentuk sikap perilaku atau komitmen pada organisasi maupun perusahaan. Budaya organisasi juga digunakan sebagai salah satu alat manajemen untuk mencapai efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan etos kerja yang baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Sutrisno, 2013).

Stanley dan Lan (2008) mengatakan bahwa *whistleblowing* adalah cara yang tepat untuk mencegah dan menghalangi kecurangan, kerugian, dan penyalahgunaan. *Whistleblowing system* merupakan salah satu langkah yang tengah digalakkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Whistleblowing system*

sendiri sudah diatur secara internasional dalam *The United Nations Convention against Corruption* of 9 December 2003 (*article 33*), dengan mengimbau setiap negara untuk menggunakan kriteria yang sesuai pada sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing untuk memberikan perlindungan kepada siapapun yang dengan itikad baik dan rasional melaporkan kepada pihak berwenang segala tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam konvensi.

IAPI (2011;319.2), pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan diantaranya, keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi oprasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Larasati & Surtikantri (2019), mengatakan bahwa pengendalian internal, *whistleblowing system*, *good corporate governance* berpengaruh yang positif baik secara parsial maupun simultan terhadap pencegahan *fraud*. Nuryanti (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan *e-procurement* dan pengendalian internal secara parsial memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa. Muthmainnah (2019), mengatakan bahwa secara parsial komitmen organisasi, budaya organisasi, dan keefektifan pengendalian internal, masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. Oguda, dkk (2015), mengatakan bahwa *Findings of the study revealed that there was a statistically significant and positive relationship between the adequacy of internal control systems and fraud prevention and detection in district treasuries in Kakamega County.*

METODE PENELITIAN

Objek dari penelitian ini adalah 19 Dinas Pemerintah Kota Bogor. Lokasi penelitian di Pemerintah kota Bogor. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan asosiatif. (Sugiyono, 2013 ; 59), Deskriptif merupakan penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri baik satu variabel/lebih. Asosiatif adalah suatu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan karakteristiknya data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif, dimana data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan/diberi *scoring* (Kasiram, 2008). Data yang digunakan adalah data primer. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana *purposive sampling* dapat disebut juga sebagai *judgement sampling* yang merupakan pengambilan sampel dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama pertimbangan yang diberikan oleh sekelompok pakar atau *expert* (Sanusi, 2011).

METODE ANALISIS DATA

Sugiyono (2013:206), menyatakan bahwa analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analisis*) digunakan untuk memprediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen dinaikan atau diturunkan nilainya. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Widiayarta, dkk (2017), Adapun model dalam analisis regresi linear berganda secara sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

$$Y = \text{Pencegahan } fraud \text{ (Y)}$$

- a = Konstanta
- β_1 = Koefisien regresi dari variabel Budaya Organisasi
- β_2 = Koefisien regresi dari variabel *E-procurement*
- β_3 = Koefisien regresi dari variabel *Whistleblowing System*

- β_4 = Koefisien regresi dari variabel Pengendalian Internal
- X_1 = Budaya Organisasi
- X_2 = *E-procurement*
- X_3 = *Whistleblowing System*
- X_4 = Pengendalian Internal
- e = Faktor pengganggu

Koefisien Korelasi Berganda

Analisis koefisien korelasi berganda (R) digunakan untuk menerangkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Dalam hal ini menggunakan analisis korelasi berganda/*multiple correlation* digunakan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) antara variabel bebas dengan variabel terikat (Sugiyono, 2013). Cara mengetahui keadaan korelasi digunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 1 Interpretasi Analisis Korelasi :

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2012)

Analisis Koefisien Determinasi

Ghozali (2016: 95), Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

- KD = Koefisien Determinasi
- r = Koefisien Korelasi

Pengujian Hipotesis

1. Uji F

Ghozali (2016: 96), Uji F adalah uji signifikan keseluruhan dari regresi sampel yang menguji *joint* hipotesis secara simultan. Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Adapun pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

- a. Jika probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- b. Jika probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

2. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas (independen) secara masing-masing parsial atau individu, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen) (Priyatno, 2011 ; 252). Pada tingkat signifikansi 5% dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Adapun pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi $< 5\%$ ($\alpha = 0,05$) maka terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen atau H_a diterima dan H_0 ditolak.
- b. Jika nilai signifikansi $> 5\%$ ($\alpha = 0,05$) maka terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen atau H_a ditolak dan H_0 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggapan Responden

Berdasarkan rekapitulasi jawaban dari masing-masing responden, maka

keseluruhan tanggapan atau jawaban responden dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 Rekapitulasi Jawaban Responden

Variabel	Nilai Rata-rata	Keterangan Skor Tanggapan
Budaya Organisasi	4,25	Setuju
<i>E-procurement</i>	4,00	Setuju
<i>Whistleblowing System</i>	4,00	Setuju
Pengendalian Internal	4,00	Setuju
Pencegahan <i>Fraud</i>	4,00	Setuju

Sumber : Data diolah Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan hasil dari jawaban 73 responden atas pertanyaan yang ada pada variabel budaya organisasi terdiri dari 9 item pertanyaan pada skala Likert 5 poin. Rata-rata skor dari jawaban responden sebesar 4,25, dengan keterangan rata-rata setuju. Variabel *e-procurement* terdiri dari 24 item pertanyaan pada skala Likert 5 poin. Rata-rata skor dari jawaban responden sebesar 4,00, dengan keterangan rata-rata setuju. Variabel *whistleblowing system* terdiri dari 7 item pertanyaan pada

skala Likert 5 poin. Rata-rata skor dari jawaban responden sebesar 4,00, dengan keterangan rata-rata setuju. Variabel pengendalian internal terdiri dari 15 item pertanyaan pada skala Likert 5 poin. Rata-rata skor dari jawaban responden sebesar 3,75, dengan keterangan rata-rata setuju. Variabel pencegahan *fraud* terdiri dari 13 item pertanyaan pada skala Likert 5 poin. Rata-rata skor dari jawaban responden sebesar 4,00, dengan keterangan rata-rata jawaban setuju.

Uji Validitas

Tabel 3 Rekapitulasi Uji Validitas

Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Nilai Signifikansi	Keputusan
Budaya Organisasi	0,646	0,2272	0,000	Valid
<i>E-procurement</i>	0,765	0,2272	0,000	Valid
X2.17	0,135	0,2272	0,288	Tdk Valid
X2.22	0,126	0,2272	0,256	Tdk Valid
<i>Whistleblowing System</i>	0,743	0,2272	0,000	Valid
Pengendalian Internal	0,598	0,2272	0,000	Valid
Pencegahan <i>Fraud</i>	0,638	0,2272	0,000	Valid
Y.7	0,020	0,2272	0,868	Tdk Valid

Sumber : Data diolah Tahun 2020

Berdasarkan tabel hasil uji validitas pada tabel 3, dapat dilihat terdapat 2 butir kuesioner pada variabel independen dan 1 butir kuesioner pada variabel dependen yang dinyatakan tidak valid. Variabel tersebut diantaranya variabel X2.17, X2,22, dan Y.7, ketiga butir kuesioner tersebut tidak layak untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Sehingga peneliti

memilih untu melakukan *drop of* atau menghapus ketiga butir pertanyaan pada variabel tersebut, dan peneliti juga melakukan pengujian validitas yang kedua untu memastikan bahwa semua kuesioner benar-benar valid. Dalam hasil uji validitas yang kedua seluruh pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid. Sehingga

hanya ada 65 butir kuesioner yang akan diuji dan telah diisi oleh 73 responden.

Uji Realibilitas
Tabel 4 Rekapitulasi Uji Realiabilitas

Variabel	Realibility Coefficient	Cronbach Alpha	Keputusan
Budaya Organisasi	9 item pertanyaan	0,624	Reliabel
<i>E-procurement</i>	22 item pertanyaan	0,907	Reliabel
<i>Whistleblowing System</i>	7 item pertanyaan	0,797	Reliabel
Pengendalian Internal	15 item pertanyaan	0,753	Reliabel
Pencegahan <i>Fraud</i>	12 item pertanyaan	0,821	Reliabel

Sumber : Data diolah Tahun 2020

Berdasarkan hasil uji realibilitas diatas, dapat dilihat pada nilai *cronbach alpha* untuk budaya organisasi sebesar $0,624 > 0,06$, *e-procurement* sebesar $0,907 > 0,06$, *whistleblowing System* sebesar $0,797 > 0,06$, Pengendalian Internal sebesar $0,753 > 0,06$, dan pencegahan *fraud* sebesar $0,821 > 0,06$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dan variabel terikat yang akan diuji dalam penelitian ini memiliki data yang reliabel.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Dari hasil pengujian normalitas dengan menggunakan *Kolomogrov smirnov*, dapat diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) untuk variabel Budaya organisasi, *e-procurement*, *whistleblowing system*, pengendalian internal dan pencegahan fraud yaitu sebesar 0,612. Dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari nilai alpha 0,05. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel terdistribusi secara normal. Sehingga data dapat digunakan untuk mengukur pengaruh budaya organisasi, *e-procurement*, *whistleblowing system*, dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* didalam proses pengadaan barang/jasa.

Uji Multikolonieritas

Dari hasil pengujian, diperoleh nilai VIF dan nilai *Tolerance* untuk budaya organisasi sebesar 1,899 dan 0,527, *e-procurement* 1,893 dan 0,528,

whistleblowing system 1,601 dan 0,625, dan pengendalian internal 1,960 dan 0,510. Sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel memiliki nilai VIF kecil dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,100. Dari hasil pengujian tersebut bermakna bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas pada model regresi. Sehingga seluruh variabel layak digunakan untuk memprediksi pengaruh pencegahan *fraud* didalam proses pengadaan barang/jasa.

Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil pengujian, diperoleh bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Serta hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Jadi seluruh variabel layak digunakan untuk memprediksi pengaruh pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel bebas dan terikat. Serta digunakan untuk memprediksi bagaimana perubahan nilai dari variabel terikat, bila nilai variabel bebas dinaikan atau diturunkan nilainya. Berikut hasil pengujian analisis regresi linear berganda sebagai berikut :

Tabel 5 Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	
	B	Std. Error	Coefficients Beta			
	(Constant)	4,297	4,202		1,023	,310
1	Budaya Organisasi	,287	,141	,198	2,034	,046
	E-procurement	,161	,042	,370	3,795	,000
	whistleblowing system	,259	,127	,183	2,044	,045
	pengendalian internal	,201	,086	,232	2,338	,022

a. Dependent Variable: pencegahan fraud

Sumber : Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 5 uji regresi linear berganda diatas maka, dapat diperoleh model persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut :

$$Y = 4,297 + 0,287X_1 + 0,161X_2 + 0,259X_3 + 0,201X_4 + 0,555$$

Interpretasi dari model persamaan regresi tersebut yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil persamaan regresi tersebut diperoleh nilai konstanta sebesar 4,297, yang artinya jika X_1 (budaya organisasi), X_2 (*e-procurement*), X_3 (*whistleblowing system*), X_4 (pengendalian internal) nilainya adalah 0, maka besarnya Y (pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa) nilainya positive sebesar 4,297.
2. Koefisien regresi variabel X_1 (budaya organisasi) memiliki nilai sebesar 0,287, yang artinya setiap peningkatan X_1 (budaya organisasi) sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y (pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa) sebesar 0,287 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
3. Koefisien regresi variabel X_2 (*e-procurement*) memiliki nilai sebesar 0,161, yang artinya setiap peningkatan X_2 (*e-procurement*) sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y (pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa) sebesar 0,161

satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

4. Koefisien regresi variabel X_3 (*whistleblowing system*) memiliki nilai sebesar 0,259, yang artinya setiap peningkatan X_3 (*whistleblowing system*) sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y (pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa) sebesar 0,259 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
5. Koefisien regresi variabel X_4 (pengendalian internal) memiliki nilai sebesar 0,201, yang artinya setiap peningkatan X (pengendalian internal) sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan Y (pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa) sebesar 0,201 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Koefisien Korelasi Berganda

Analisis koefisien korelasi berganda (R) digunakan untuk menerangkan kekuatan serta arah hubungan antara variabel budaya organisasi, *e-procurement*, *whistleblowing system*, dan pengendalian internal secara bersama-sama terhadap pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa. Adapun nilai koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel 6 berikut : Tabel 6 Analisis Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary									
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,812 ^a	,659	,639	2,355	,659	32,865	4	68	,000

Predictors: (Constant), pengendalian internal, Budaya Organisasi, *whistleblowing system*, *E-procurement*

Sumber : Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 6 diatas, diperoleh hasil pengujian koefisien korelasi berganda dengan nilai R^2 sebesar 0,659. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya hubungan secara bersama-sama dari variabel independen (Budaya Organisasi, *E-*

procurement, *Whistleblowing System*, Pengendalian Internal) berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi berada pada kategori kuat yakni berada pada kisaran 0,60 – 0,799.

Koefisien Determinasi

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,812 ^a	,659	,639	2,355

a. Predictors: (Constant), pengendalian internal, Budaya Organisasi, whistleblowing system, E-procurement

Sumber : Data diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 7 diatas, dapat diperoleh hasil pengujian koefisien determinasi dengan nilai $R^2 = 0,659$ atau 65,9%. Artinya pengaruh dari budaya organisasi, *e-procurement*, *whistleblowing*

system, dan pengendalian internal memiliki pengaruh sebesar 65,9% terhadap pencegahan *fraud*, dan 35,1% merupakan sumbangsih pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

1. Uji F (Simultan)

Tabel 8 Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	728,926	4	182,231	32,865	,000 ^b
	Residual	377,047	68	5,545		
	Total	1105,973	72			

a. Dependent Variable: pencegahan fraud

b. Predictors: (Constant), pengendalian internal, Budaya Organisasi, whistleblowing system, E-procurement

Sumber : Data diolah Tahun 2020

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa hasil pengujian menggunakan uji F, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan

atau bersama-sama budaya organisasi, *e-procurement*, *whistleblowing system*, dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.

2. Uji t (Parsial)

Tabel 9 Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,297	4,202		1,023	,310
	Budaya Organisasi	,287	,141	,198	2,034	,046
	E-procurement	,161	,042	,370	3,795	,000
	whistleblowing system	,259	,127	,183	2,044	,045
	pengendalian internal	,201	,086	,232	2,338	,022

a. Dependent Variable: pencegahan fraud

Sumber : Data diolah tahun 2020

a. Uji t Variabel Budaya Organisasi

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh nilai t_{hitung} untuk Budaya Organisasi sebesar 2,034, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,995. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,034 > 1,995$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,046 < 0,05$. Hal dapat diartikan bahwa H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Budaya Organisasi secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Proses Pengadaan Barang/jasa.

b. Uji t Variabel E-procurement

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel *E-procurement* sebesar 3,795, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,995. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,795 > 1,995$), dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *E-procurement* secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Proses Pengadaan Barang/jasa.

c. Uji t Variabel Whistleblowing System

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel *whistleblowing System* sebesar 2,044, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,995. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,044 > 1,995$), dengan tingkat signifikansi sebesar $0,045 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Whistleblowing System* secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Proses Pengadaan Barang/jasa.

d. Uji t Variabel Pengendalian Internal

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Pengendalian internal sebesar 2,338, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,995. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,338 > 1,995$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa H_a diterima. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa Pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Proses Pengadaan Barang/jasa.

Pembahasan**Uji F**

Dari hasil pengujian uji F, menunjukkan bahwa adanya hubungan pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama antara budaya organisasi, *e-procurement*, *whistleblowing system* dan pengendalian internal, terhadap pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Mutamainnah (2019), Larasati (2019), Oguda (2015), Nuryanti (2015), Wulandari (2019), Widiyarta dkk (2017), yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama dari budaya organisasi, *e-procurement*, *whistleblowing system*, dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.

Uji t**1. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Proses Pengadaan Barang/jasa**

Zelmiyanti dan Anita (2015), budaya kejujuran dan etika dengan nilai yang tinggi dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam sebuah organisasi. Dari hasil uji parsial budaya organisasi, menunjukkan bahwa ada hubungan pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi dengan pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Wulandari (2017), Mutamainnah (2019), Widiyarta dkk (2017), yang menyatakan bahwa budaya organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa.

2. Pengaruh *E-procurement* terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Proses Pengadaan Barang/jasa

Artantri dkk (2016), mengatakan bahwa *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa sehingga celah kecurangan dapat dikurangi. Serta *e-procurement* merupakan inovasi dalam proses pengadaan barang/jasa, yang mampu mencegah terjadinya kecurangan. Dari hasil uji parsial *e-procurement*, menunjukkan bahwa adanya hubungan pengaruh yang signifikan antara *e-procurement* dengan pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Artantri, dkk (2016), dan Nuryanti (2015) yang menyimpulkan bahwa *e-procurement* memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa.

3. Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Proses Pengadaan Barang/jasa

Dari hasil uji parsial *whistleblowing system*, menunjukkan bahwa ada hubungan pengaruh yang signifikan antara *whistleblowing system* dengan pencegahan *fraud* didalam proses pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Larasati dan surtikanti (2019), Wulandari (2017), Widiyarta dkk (2017), yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa.

4. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Proses Pengadaan Barang/jasa

Dari hasil uji parsial pengendalian internal, menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengaruh positif dan signifikan antara pengendalian internal dengan pencegahan *fraud* didalam proses pengadaan barang/jasa. Sehingga bentuk pengendalian dalam sebuah organisasi dapat berpengaruh terhadap budaya dalam suatu organisasi. Hasil penelitian ini

mendukung penelitian dari Soleman (2013), Mutamainnah (2019), Nuryanti (2015), Larasati (2019), Oguda (2015), yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* didalam proses pengadaan barang/jasa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pengamatan secara langsung selama proses penelitian, hasil pengujian dan pengolahan analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dijelaskan, serta tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi, *E-procurement*, *Whistleblowing System* serta Pengendalian Internal Terhadap

Pencegahan *Fraud* di Dalam Proses Pengadaan Barang/jasa. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Budaya organisasi (X_1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa.
2. *E-procurement* (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa.
3. *Whistleblowing system* (X_3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa.
4. Pengendalian internal (X_4), secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa.
5. Budaya organisasi (X_1), *e-procurement* (X_2), *whistleblowing system* (X_3), dan pengendalian internal (X_4), secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan serta pengujian, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pemerintah Kota Bogor, seharusnya untuk setiap dinas memiliki sistem *whistleblowing system* secara terpisah, dan sebaiknya untuk pemerintah kota bogor agar lebih memperhatikan dan memonitoring kembali budaya organisasi, *e-procurement*, *whistleblowing system*, dan pengendalian internal dalam dinas

pemerintah kota bogor. Serta juga lebih memperhatikan kembali upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecurangan khususnya didalam proses pengadaan barang/jasa, karena prosesnya yang panjang dan banyak orang terlibat didalamnya.

2. Bagi Pemerintah Kota Bogor, sebaiknya untuk lebih mempermudah kembali proses perizinan penelitian disetiap lembaga maupun dinas yang berada di lingkup pemerintah kota bogor. Serta proses pengambilan data penelitian disetiap lembaga maupun OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Bogor.
3. Dalam penelitian ini hanya digunakan 4 variabel yang diteliti dalam upaya pencegahan kecurangan, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel-variabel lain diluar variabel yang telah diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini juga membatasi populasi hanya pada Dinas Pemerintah Kota Bogor saja tanpa melibatkan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) yang juga ikut serta dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dalam pemerintah kota Bogor. Sehingga untuk peneliti yang akan datang disarankan untuk dapat menyertakan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) sebagai populasi penelitian, untuk mengetahui proses pengadaan barang/jasa dengan jumlah pagu diatas Rp. 200.000.000, karena proses pengadaan barang/jasa untuk nilai pagu diatas Rp. 200.000.000 seluruh prosesnya dilakukan di UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa).

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Puji. 2018. **Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa**

Pemerintah.
Fokusmedia.

Bandung.

- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2008. **Auditing dan Jasa Assurance**. Edisi 12. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Artantri, Luh Putu Resti Mega; Lilik Handajani dan Endar Pituringsih. 2016. **Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok**. *NeO~Bis*, 10(1): 16-32.
- Didi, & Indra Cahya Kusuma. 2018. **Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Pemerintah Kota Bogor**. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan indonesia*. 15 (1), 1 - 20.
- Didi, D. (2018). **Pengaruh Keadilan Distributif Dan Keadilan Prosedural Terhadap Kecenderungan Pegawai Untuk Berbuat Curang (Fraud) Dengan Ketaatan Aturan Akuntansi Sebagai Variabel Mediasi**. *JURNAL AKUNIDA*, 2(2), 41-54.
- Ghozali, Imam. 2016. **Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)**. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hambani, S. (2015). **Implementasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Pada Universitas Djuanda Bogor**. *JURNAL AKUNIDA*, 1(2), 47-60.
- IAPI. 2011. **Standar Profesional Akuntan Publik**. Jakarta: Penerbit IAPI.
- Karyono, 2013. **Forensic Fraud**. Yogyakarta: C.V Andi.
- Kasiram, Mohammad. 2008. **Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif**. Malang: UIN Malang Press.
- Larasati, Yarry Septia, & Surtikanti. 2019. **Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Riset Empiris Pada Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Dan Perikanan)**. *JAFTA*. 1 (1), 31 – 43.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP). 2010. **Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia**. Jakarta: Smesco UKM.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP). 2010. **Modul 1 Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama**. Team LKPP. Jakarta
- Majampoh, Greise, David P.E. Saerang, & I Gede Suwetja. 2017. **Evaluasi Sistem Manajemen Dan Akuntansi (SIMAK BMN) Pada Kantor Imigrasi Kelas II Tahunan**. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 12 (2), 681 - 693.
- Nawi, Mohd N.H; Saniah Roslan; Nurul Azita Salleh; Faisal Zulhumadi; Aizul Nahar Harun. 2016. **The Benefits and Challenges of E procurement Implementation: A Case Study of Malaysian Company**. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(S7): 329-332.
- Nurlukman, Adi Dwiyanto. 2017. **E-procurement: Inovasi**

- Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis e Government Di Indonesia. Journal Of Government and Civil Society.* 1 (1), 81 – 93.
- Nuryanti, Dona Ritma Putri. 2015. *Pengaruh Implementasi E-procurement Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Survey Pada Dua BUMN Di Bandung).* Fakultas Ekonomi. Universitas Pasundan Bandung.
- Oguda, Ndage, Joseph; Odhilambo Albert; Prof John Byaruhanga. 2015. *Effect Of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County. Internasional Journal of Business and Management Invention.* ISSN: 2319-8028.
- Sanusi, Anwar. 2011. **Metodologi Penelitian Bisnis.** Jakarta: Salemba Empat.
- Soleman, Rusman. 2013. *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud.* JAAI. 17 (1), 57 – 74.
- Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.** Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Nomor Tahun 2018. **Katalog Elektronik & E purchasing.** Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 2008. **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.** Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 70 Tahun 2012.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2018. **Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.** Jakarta.
- Priyatno, Dwi. 2009. **Mandiri Belajar SPSS.** Yogyakarta: Mediakom.
- Setiawan, A. B., & Surtini, E. (2017). **Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.** *JURNAL AKUNIDA*, 3(1), 55-70.
- Tuanakotta, Theodorus. M. 2010. **Akuntansi Forensik dan Auditor Investigatif.** Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI). Edisi ke 2: Jakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2010. **Teori dan Praktek Auditing.** Jakarta: Harvarindo.
- Widiyarta, Kadek; Nyoman Trisna Herawati; Anantawikrama Tungga Atmadja. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng).* E-journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha. Vol: 8 No: 2.
- Wulandari, Trisna. 2017. *Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit*

- internal, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Zelmiyanti, Riri; Lili Anita. 2015. *Pengaruh Budaya Organisasi, dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening.* Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis. Vol: 8 67-76.
- Beritasatu.com. 2019. **Pengusutan Kasus Dana Fiktif Pilkada Kota Bogor.** Diakses 6 Februari 2020. Pukul 11.56. <https://www.beritasatu.com/gapolitan/560765/bimaaryadukung-pengusutan-kasusdanafiktifpilkada-bogor>.
- Kompas.com. 2015. **Polres Bogor Usust Dugaan Pengaturan Pemenanga Tender Stadion Gor Pakansari.** Diakses 7 Februari 2020. Pukul 11.45. <https://regional.kompas.com/read/2015/06/23/22462481/Polresbogor.Ust.Kasus.Dugaan.Pengaturan.Pemenang.Tender.Stadion.GORPakansari>
- (<https://www.integrityindonesia.com/id/bl/2018/01/03/perusahaan-raksasakehilangan-miliaran-dolar-karenafraud-ini-pelajaran-yang-bisadipetik/>) Diakses Tanggal 2 Februari 2020 Pukul 11.00
- (<https://www.google.com/amp/s/amp.beritasatu.com/nasional/124139/70persenkorupsi-indonesia-daripengadaan-barang-dan-jasa>) Diakses Tanggal 2 Februari 2020 Pukul 11.55.
- (https://www.integrityindonesia.com/id/blog/2019/03/01_5-upaya-memitigasi-procurement-fraud-di-perusahaan-anda/) Diakses 3 Februari 2020 Pukul 12.05.
- (<https://m.detik.com/news/berita/d4773768/lkpp-korupsi-barangjasapemerintahduduki-posisi-2kasus-yangditangani-kpk/>) Diakses Tanggal 3 Februari 13.52.
- (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011101~PMK.02~2011PerLam%20III.htm>) Diakses Tanggal 5 Februari 2020 Pukul 08.45